



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEPOLITISASI MILITER INDONESIA:
STUDI KASUS FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL
KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD
DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2004-2009**

DISERTASI

**MULYADI
890402201X**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
DESEMBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DEPOLITISASI MILITER INDONESIA:
STUDI KASUS FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL
KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD
DI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2004-2009**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memeni Parsyaratan
Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Politik**

**MULYADI
890402201X**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
DESEMBER 2009**

“Disertasi ini untuk kemuliaan isteri dan putra-putriku yang dengan setia mendampingi dalam suka dan duka. Merekalah yang memberi inspirasi yang menajubkan Untuk sebuah kehidupan dinamis yang luar biasa.”



Istriku Yang Setia:

Ardhana Ulfa Azis

Kedua buah hatiku:

Opu Pangeran Ali Asyam

Opu Maharani Batari Khalizah

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri
dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mulyadi

NPM : 890402201X

Tanda tangan :

Tanggal : Selasa, 22 Desember 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Mulyadi
NPM : 890402201X
Program Studi : Ilmu Politik
Tanggal : Depolitisasi Militer Indonesia:
Studi Kasus Fungsi Pembinaan Teritorial
Komando Kewilayahan TNI AD
Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA ()
Kopromotor I : Prof. Dr. Burhan D. Magenda, MA ()
Kopromotor II: Chusnul Mar'yah, *Ph.D* ()
Tim Penguji : Prof. Dr. Bambang Shergi. L., M.Sc (Ketua) ()
: Dr. Valina Singka Subekti, M.Si (Anggota) ()
: Dr. Isbodroini Suyanto, MA (Anggota) ()
: Julian Aldrin Pasha, MA, *Ph.D* (Anggota) ()
: Prof.(Riset) Dr. Indria Samego, MA (Anggota) ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Selasa, 22 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Penulis sungguh-sungguh menyadari bahwa penyelesaian penelitian dan penulisan disertasi ini merupakan karunia besar dari Yang Maha Agung, Allah SWT. Atas karunia-Nya itu, Penulis memiliki “kewajiban agung” untuk selalu mensyukurinya dengan berucap subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar!

Disertasi dengan judul "Depolitisasi Militer Indonesia: Studi Kasus Fungsi Pembinaan Teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2009" tidaklah diselesaikan dengan proses yang amat mudah. Berbagai hambatan Penulis temui terutama dalam tatap-tahap penelitian, penulisan dan bimbingan, seperti keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Namun Penulis yakin bahwa diantara hambatan-hambatan yang ditemui itu juga dialami oleh peneliti lain bahkan sangat mungkin dengan penuh ketegangan. Sungguh suatu anugerah yang patut Peneliti syukuri karena semua hambatan itu berhasil dilewati sebelum batas masa studi berakhir.

Penulis dengan rasa haru menghaturkan terima kasih yang dalam dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberi simpati, perhatian dan bantuan atas penyelesaian disertasi ini. Rasa hormat yang tinggi hingga akhir hayat Penulis haturkan kepada Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA selaku Promotor, Prof. Dr. Burhan Djabir Magenda, MA selaku Co-Promotor I dan Chusnul Mariyah, *Ph.D* selaku Co-Promotor II. Ketiganyalah yang membimbing Penulis dengan penuh kesejukan di bawah lindungan tradisi akademik ‘khas UI’; tegas pada kompetensi tapi sangat memanusiaakan manusia.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada Dr. Isbodroini Suyanto, MA, Julian Aldrin Pasha, MA, *Ph.D* dan Prof. (Riset) Indria Samego, MA, *Ph.D* atas masukan dan kritiknya sebagai anggota Tim Penguji. Semua itu tidak terlaksana dengan baik tanpa dukungan penuh Dr. Valina Singka Subekti, MA dan Nurul Nuranjani, S.IP, M.Si masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia yang dibantu oleh Staf Program Pascasarjana Ilmu Politik Fisip UI yang sangat bersahabat; Mbak Hera, Mbak Romlah, Mbak Retno, Mas Deni, Mas Bioso dan Mas Anto untuk itu Penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Penghargaan yang tak kurang nilainya juga penulis haturkan kepada para informan dan narasumber yang dimulai dari Supriyadi. M.Si (Pengurus DPP KNPI), Dr. Adi Suryadi Culla (Ketua RT007/RW04 Jakarta Pusat), Fredi Anshari Noya (Ketua RT11/RW06 Kel. Pisangan, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur), Somad (Ketua RT13/RW08 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jakarta Selatan), Sumantri (Anggota/Mantan Kasi V Humas Menwa UI), Babinsa Kodam Jaya/Jayakarta (minta namanya tidak disebutkan), Mayjen TNI Kariyadi (Kaster TNI AD) dan para Staf di Mabes TNI AD, Kolonel TNI AD Arminson (Paban Bintahwil Mabes TNI AD), Kolonel TNI AD F.TB. Tambunan (Paban Komsos Mabes TNI AD), Brigjen TNI Moeldoko (Kasdam Jaya/Jayakarta) beserta Staf yang mendampinginya, Arif (Kabid. Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta), Alamsyah Gayo, SH (Kabid. Kewaspadaan Provinsi DKI Jakarta), Ichwan BN (Kabid. Hubungan Kelembagaan Provinsi DKI Jakarta), Tafdil (Kabid. Integrasi Bangsa Provinsi DKI Jakarta), Primus Wawo, M.Si (Kesbangpol DKI Jakarta), DR. Hj. Sylviana Murniati (Walikota Jakarta Pusat), M. Idris (Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat), Atma Senjaya, M.Si (Walikota Jakarta Utara), Saurma M. Sagala (Kasubid. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Yanto Satyar (Kepala Kantor Kesbang Kota Administrasi Jakarta Barat), Mulya B. Wahab (Kepala Bidang Kewaspadaan Kota Administrasi Jakarta Barat), Mazhar Setiabudi (Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan Kota Administrasi Jakarta Barat), serta personil BIN dan BAIS (minta namanya tidak disebutkan). Atas posisi dan jabatannya dalam organisasi, serta pengetahuan dan keterbukaannya memberikan data dan informasi terkait topik penelitian ini membuat Penulis sangat puas dan bersimpati.

Atas persaudaraan, solidaritas dan toleransinya Penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Universitas Indonesia; Dr. Sri Zulhaeriyah, Raden Siliwanti, M.Si, Eni Suryanjani, M.Si, Ari Darmastuti, M.Si, Margaretha Yunita, M.Si, Sitaresmi S. Soekanto, M.Psi.T, Thomas Tokan Pureklolon, M.Si, Zulfikar Ghazali, M.Si, Sunardi, M.Si, Ujang Kamaruddin, M.Si, Ernani, M.Si, Toeswoyo, M.Si, Fredy L. Tobing, M.Si, Dumilah Ayunintyas, M.Si, Rivai Ras, M.Si, Dr. Lili Romli, Dr. Yudi Krisnandi, Dr. Heriyandi Rony, Dr. Akhyar Asmui (Almarhum), Dr. Fauzan Ali Rasyid, Dr. Anton Winardi,

Affan Sulaiman, M.Si, Dr. Muh. Findi, Suryadi Lambali, M.Si, Dr. Adi Suryadi Culla, Dr. Armin Arsyad, Arsyad Genda, M.Si, Prof. Dr. Rayid Asba, Dr. Sangkala, Dr. Hasan Rahmani, Dr. Hasrullah, Dr. Jayadi Nas, Dr. Sudiman, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Dr. Ary Bainus dan Dr. Tommy Legowo.

Kepada Dr. Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, M.Si, Dr. Indar Arifin, Suryadi Mappangara, M.Si, Mirzan Abadi, M.Si, Drs. Yudi, Drs. R.B. Suwondo, Dr. Adi Suryanto, Haris Rahim, M.Si, Mayor Sus TNI AU Drs. Andi Muh. Darlis, Umar Syadat, M.Si, Akbar Faizal, M.Si, Agus Sarwanto, M.Si, Indra Jaya, M.Si, Muh. Dedy, SE dan Andi Tenri Sompia, M.Si, Penulis ucapkan terima kasih yang dalam atas keterlibatannya mengatasi berbagai “kesulitan teknis” Penulis baik di awal-awal maupun di akhir-akhir studi. Kepada Dr. Zulfikri Suleman yang banyak memberikan bahan dan komentar yang sangat berguna bagi penulisan disertasi ini Penulis memberikan pujian tanpa akhir. Khusus kepada Prof. Dr. Nazaruddin Syamddin, MA dan Chusnul Mar’yah, *Ph.D* keduanya sangat pantas mendapatkan segalanya setelah menjadi pengganti orang tua Penulis di Jakarta. Kepada Mayjen TNI (Purn) Abdul Rivai penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selaku orang tua dan Ketua Umum BPP KKSS. Kepada Prof. Dr. A. Amiruddin, Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Prof. Dr. Anwar Arifin Penulis menghaturkan terima kasih dan hormat yang tulus atas ketokohan, ketauladan dan nasehat-nasehatnya yang sangat berharga.

Suatu kedurhakaan yang tak terampuni bilamana Penulis menyepelekan jasa baik kedua orang tua dan mertua yang senantiasa memberikan doa restu, motivasi dan semangat agar tetap tegar menghadapi berbagai tantangan selama menjalani studi S2 dan S3 di Jakarta. Merekalah yang meminta Penulis agar tetap mengambil hikmah yang dalam dari kebijakan Dekan Fisip Unhas Prof. Dr. Hafid Cangara, M.Sc yang menarik izin studi dan mengancam memberhentikan Penulis sebagai dosen PNS di Fisip Unhas. Untuk itu rasa hormat dan cinta yang sangat dalam Penulis haturkan kepada kedua orang tua; ayahanda H. Muh. Nahaya dan ibunda Hj. Cinta, ayah mertua; Drs. Andi Azis Nur, serta Keluarga Besar Petta La Sinrang di Jakarta. Merekalah yang sangat pantas menerima segala kehormatan dan penghargaan yang timbul atas kesuksesan studi ini. Kepada ibu mertua Rostina Dg. Siang (Almarhum) Penulis selalu merindukannya karena telah

menjadi inspirasi dan motivasi bagi kesuksesan menantu, anak dan cucunya. Juga dukungan dari adik-adik tercinta; Sriyani Nahaya dan suami, Mustadir Nahaya dan isteri, Asriyadi Nahaya dan isteri, Andi Arjuna Rizaldi Azis dan isteri, Andi Lip Ariyanto Azis dan isteri, Andi Arsinta Pratiwi Azis dan suami, Sitti Aisyah Nahaya dan suami, Arab Saudi Nahaya dan isteri, Sitti Fatimah Nahaya dan suami, Saddam Husna Nahaya dan Muh. As'ad Clinton Nahaya.

Rasa bersalah seorang suami dan ayah yang banyak mengabaikan tanggung jawabnya penulis sampaikan kepada isteri setia Ardhana Ulfa Azis, S.IP, M.Si, (Daeng Ratu) dan kedua putra-putri tersayang; Opu Pangeran Ali Asyam (Saoraja Madika Ponrang Makole Baebunta Andi Ali Asyam Pangeran Iskandar Daeng Maddengka Opu Cella) dan Opu Maharani Batari Khalizah (Saoraja Madika Buah Opu Andi Maharani Batari Khalizah Daeng Rilangi Tenri Lawa Opu Bere). Tanpa kesabaran, cinta dan kesetiaan isteri dalam mendampingi, serta keceriaan buah hati dalam menemani di saat-saat Penulis mengalami 'krisis semangat' sudah pasti perjalanan studi penulis tidak sampai ke ruang-ruang kegembiraan.

Kesalahan sekecil apapun yang ada di dalam disertasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Tidak ada motivasi lain meneliti topik yang oleh sebagian orang dinilai sensitif ini kecuali demi kemajuan ilmu politik di tanah air dan kejayaan militer negara Penulis. Hanya orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang ingin berubah ke arah yang lebih baik, serta orang-orang yang paling berjasalah yang paling pantas untuk setiap bagian-bagian yang paling baik dan berharga dari disertasi ini.

Penulis harus mengakhiri semuanya dengan suatu pernyataan bahwa balas budi akan Penulis bawa hingga akhir hayat untuk jasa baik dari mereka yang namanya sengaja tidak disebutkan satu persatu dalam lembar pengantar ini. Penulis sangat yakin dan selalu berdoa agar Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Adil akan membalasnya dengan pahala tak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Bukankah Allah SWT telah menjanjikan derajat yang tinggi bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan berilmu, serta pahala yang tak ternilai dan tak terhingga untuk setiap niat baik dan pertolongan tanpa pamrih? Amin!

Jakarta, 22 Desember 2009

Mulyadi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadi
NPM : 890402201X
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Disertasi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Depolitisasi Militer Indonesia: Studi Kasus Fungsi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2009

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Selasa, 22 Desember 2009

Yang Menyatakan

(Mulyadi)

ABSTRAK

Nama : MULYADI
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Depolitisasi Militer Indonesia: Studi Kasus Fungsi Pembinaan Teritorial Komando Kewilayahan TNI AD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2009, xvii+391 halaman, 7 lampiran, 99 buku, 7 peraturan hukum/dokumen, 12 media massa, 3 webside dan wawancara 17 narasumber, 9 informan.

Membangun TNI menjadi 'militer profesional' mensyaratkan perlunya depolitisasi militer, disamping anggaran militer yang cukup dan kultur militer pengabdian. Depolitisasi militer adalah upaya menjadikan TNI militer profesional dengan cara membebaskannya dari semua fungsi non-militer yang tidak termasuk ke dalam misi kemanusiaan (*civic mission*) dan misi perdamaian (*peace keeping*). Disertasi ini berfokus pada depolitisasi militer sebagai studi kasus utama. Sementara dua indikator —lain, yaitu anggaran militer yang cukup dan kultur militer pengabdian— hanya digunakan untuk membantu analisis.

Reformasi militer yang ditandai kelahiran sejumlah kebijakan depolitisasi militer bertujuan mengubah wajah tentara pretorian TNI menjadi tentara profesional untuk melaksanakan fungsi pertahanan militer (*military defense*) yang cepat-tanggap (*responsif*) dan dapat diandalkan (*reliable*) terhadap ancaman militer negara musuh. Namun kebijakan TNI yang tetap mempertahankan fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD dinilai belum sepenuhnya berminat pada program militer profesional, sehingga menyisakan pro dan kontra.

Disertasi ini membahas 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu: (1) pembinaan persatuan dan kesatuan; (2) pembinaan keamanan wilayah (*siskamling*); (3) pembinaan tokoh masyarakat; (4) pembinaan generasi muda; (5) pembinaan Menwa. Studi kasus fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI AD merupakan fungsi pertahanan militer. Juga untuk menjelaskan posisi Satuan Kowil TNI AD dan fungsi pembinaan teritorialnya dalam diskursus teori militer yang ada.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif analitis, strategi penelitian studi kasus dan analisa kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara dan telaah pustaka/dokumen. Sedangkan teori yang digunakan dalam menganalisis implementasi fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD di Provinsi DKI Jakarta pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, yaitu: teori fungsi teritorial, teori militer (tentara pretorian, tentara profesional, tentara profesional revolusioner), teori perang total, teori supremasi sipil, serta teori demokrasi dan demokratisasi.

Hasil studi ini mengungkap bahwa depolitisasi militer pasca berlakunya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 belum dapat membebaskan Satuan Kowil TNI AD dari fungsi non-militer. Analisis terhadap 5 jenis kasus implementasi fungsi pembinaan teritorial Satuan Kowil TNI di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa meskipun tidak lagi mengandung politik praktis, semua fungsi teritorial Satuan Kowil TNI AD masih mencakup fungsi non-militer dan

semua fungsi non-militer itu bukan bagian dari fungsi pertahanan militer. Dengan demikian hasil studi ini menegaskan belum berlangsungnya depolitisasi militer di TNI secara menyeluruh.

Studi ini menemukan faktor internal dan eksternal sebagai dasar alasan TNI AD melaksanakan fungsi non-militer. Faktor internal, yaitu: profesionalisme non-militernya dan kultur militernya berupa Jati Diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional profesional yang sangat mengakar dalam doktrin TNI Tri Dharma Eka Putra dan doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi. Sedangkan faktor eksternal, yaitu: sistem pertahanan semesta, tugas pokok TNI operasi militer selain perang, tugas TNI AD memberdayakan wilayah pertahanan di darat, serta respon pemerintah daerah terhadap implementasi fungsi non-militer Satuan Kowil TNI AD yang tidak lagi mengandung politik praktis.

Hasil studi mengungkap adanya pergeseran sikap politik TNI AD yang kembali menganut tipologi 'tentara profesional revolusioner' setelah menganut tipologi tentara pretorian dan tipologi tentara profesional pretorian. Pilihan politik TNI AD kembali menganut tipologi 'militer profesional revolusioner' didasarkan pada pengalaman fungsi non-militernya pada masa perang revolusi kemerdekaan dan masa pergolakan internal yang telah memberinya otonomi dan eksklusifitas. Pengalaman profesional non-militernya pada masa Orde Baru juga memberinya kebanggaan profesional sebagai agen modernisasi dan pembangunan sekaligus sebagai pasukan "pemadam kebakaran".

Berdasarkan temuan tersebut dirumuskan suatu asumsi teoritis bahwa militer yang sejak lahirnya menganut tipologi 'militer profesional revolusioner' lalu kemudian menganut tipologi 'militer pretorian' dan tipologi 'profesional pretorian' sangat sulit melakukan depolitisasi militer dan cenderung kembali ke 'militer profesional revolusioner' ketimbang berlanjut ke tipologi 'militer profesional'. Kesulitan dan kecenderungan itu disebabkan oleh nilai-nilai revolusioner; Jati Diri TNI yang sudah menjadi bagian dari kultur militernya, sehingga ciri profesionalismenya berbeda dengan konsep profesionalisme dalam tipologi 'militer profesional'. Meskipun demikian disertasi ini tetap melihat bahwa depolitisasi militer memberi peluang kepada militer Indonesia untuk menjadi militer profesional.

Kata Kunci:

Depolitisasi, militer, profesionalisme.

ABSTRACT

Name : Mulyadi
Program : Political Science Department, Faculty of Social and Political Science, the University of Indonesia
Title : Indonesia Military *De-Politisation*: Case Study of Cultivating Territorial Command of TNI AD in DKI Province 2004-2009, xvii+391 pages, 7 attachments, 90 books, 7 legal documents, 12 mass media, 3 website and 17 interviewee , 9 informants.

To develop TNI (*Indonesian National Army*) to be professional military have three indicators : the need military depolitisation, the need of enough budget and military official culture. Military depolitisation is the effort of TNI professional military by freer from all non military function which excludes the humanitarian functions such as civic mission and peace keeping. This dissertation will focus on the military depolitisation as major case study. The other two indicators will be used only to fuel the analysis.

The aim of depolitisation policies are to change the image of praetorian army of TNI to be professional in order to do military defense functions, responsive and reliable towards threat from foreign enemy. However the TNI policies which are maintain the territorial functions *Satuan Kowil* TNI AD does not interested in professional military, that's why they produce *pro and con* on that issue.

This Dissertation explains the implementations of territorial functions of *Satuan Kowil* TNI AD by using 5 cases in DKI Province post the implementation of the UU TNI No. 34/2004. There are 1) *pembinaan persatuan dan kesatuan* (Cultivating the unity of the republic); 2) *pembinaan keamanan wilayah* (cultivating local territorial security); 3) *pembinaan tokoh masyarat* (cultivating the local leaders); 4) *pembinaan generasi muda* (cultivating young generations); 5) *pembinaan Menwa* (cultivating students regiment). This case study of the function of *pembinaan* territorial *Satuan Kowil* TNI AD constitute as the defense military functions. This dissertation is also explain and analysis the position of the *Satuan Kowil* TNI AD and the functions of the territorial in the theoretical analysis.

This method of the study is a qualitative, descriptive analysis, using case study as a focus of the data qualitative analysis. The data of this disertation derived from the interview, observation and library research. Some theories of the implementation of the territorial *Satuan Kowil* TNI AD in DKI Province post the implementation of the UU TNI No. 34/2004 are discussed for analyzing this dissertation. The theories are territorial function theory, military theory such as praetorian, professional and revolutionary professional military. Other theories are total war theory and civilian supremacy theory and also theory of democracy and democratisation.

The result of this study shows that military depolitisation is not yet to free *Satuan Kowil* TNI AD from the non military functions. To answers the first question which contains 5 cases also explained that the *Satuan Kowil* TNI AD implement all the function of the non military which are not in the category of the

defense military functions. So, this study shows very clear that there is no substantial program on the military depolitisation.

This study also shows that internal and external factors as the basis of the reasons of the TNI AD to conduct non military functions. Internal factors are non military professionalism, and the existence of the military TNI as people army, fighter's army during colonial era and professional army. The military conduct their activity based on Indonesian military doctrines *Tri Dharma Eka Putra and Kartika Eka Paksi*. While external factors are include total defense, military operation in a war, and also the response of the local governments towards the implementation of the non military functions *Satuan Kowil* TNI AD which is not considered as political practice.

This study is also found that there is shifting of the political attitude of TNI AD which followed the military typology revolutionary professional military after praetorian military and professional praetorian. The political choice of TNI AD —revolutionary professional military— based on the experience of non military functions during revolutionary war to get independents and afterwards. Furthermore, the experienced of military during the New Order regime are perceived as the agent of modernization and development.

This study – based on this finding- conceptualize theoretical assumption that military in Indonesia since the early used revolutionary professional military typology and move into military praetorian and professional praetorian. Therefore, this study shows the difficulties to conduct military depolitisation and tends to go back into revolutionary professional military rather than professional military because of the values of revolutionary during the development of the military in Indonesia which is embedded in the military culture. The TNI AD has professionalism character which is different from the typology of the professional military according the theory discussed above. Therefore this dissertation suggested that military depolitisation give an opportunity for the military in Indonesia become military professional.

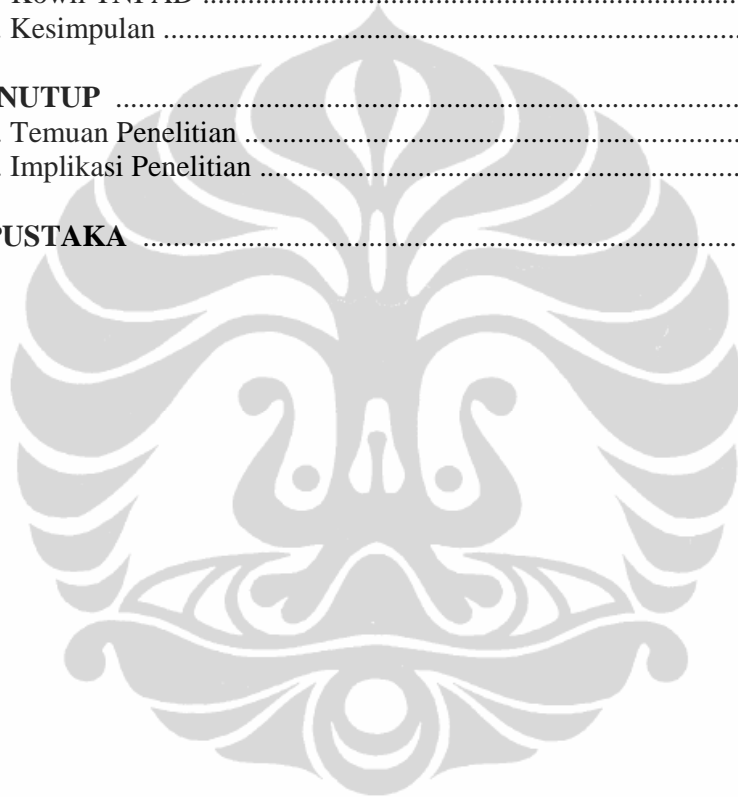
Key words:

Depolitisation, military, professional

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN/SKEMA	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
PETA PROVINSI DKI JAKARTA	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	22
1.4. Signifikansi Penelitian	22
1.5. Kerangka Pemikiran	23
1.6. Metode Penelitian	56
1.7. Sistematika Penulisan	62
BAB 2. PERKEMBANGAN FUNGSI TERITORIAL SATUAN KOWIL TNI AD	65
2.1. Komando Teritorial KNIL	65
2.2. Strategi Perang Gerilya PETA	75
2.3. Pengaruh KNIL dan PETA/HEIHO dalam Koter TNI AD	78
2.4. Tahap-Tahap Perkembangan Satuan Koter TNI AD	86
2.5. Satuan Koter TNI AD Pada Masa Konflik Internal Militer	122
2.6. Satuan Koter TNI AD Pada Masa Konflik Sipil-Militer	138
2.7. Kesimpulan	153
BAB 3. POLITISASI MILITER MASA ORDE BARU DAN DEPOLITISASI MILITER PASCA ORDE BARU	158
3.1. Politisasi Satuan Koter TNI AD Masa Orde Baru	158
3.2. Kebijakan Depolitisasi Militer Pasca Orde Baru	175
3.3. Kesimpulan	193
BAB 4. IMPLEMENTASI FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL SATUAN KOWIL TNI AD DI PROVINSI DKI JAKARTA	196
4.1. Dasar Hukum	196
4.2. Implementasi di Lapangan	209
4.3. Argumen dan Urgensi Fungsi Satuan Kowil TNI AD	236
4.4. Fungsi Binter dalam Menunjang Profesionalisme TNI AD dan Sistem Pertahanan Semesta	248
4.5. Kompetensi Satuan Kowil TNI AD	250

4.6. Masalah-Masalah di Lapangan	254
4.7. Kesimpulan	266
BAB 5. PERAN POLITIK SATUAN KOWIL TNI AD PASCA BERLAKUNYA UU TNI NOMOR 34 TAHUN 2004	269
5.1. Profesionalisme Non-Militer dalam Satuan Kowil TNI AD	269
5.2. Fungsi Non-Militer dalam Doktrin Perang Total	293
5.3. Supremasi Sipil dan Peran Politik Militer	302
5.4. Kontrol Sipil dalam Demokrasi dan Demokratisasi	307
5.5. Profesionalisme Revolusioner dalam Satuan Kowil TNI AD	326
5.6. Kesimpulan	357
BAB 6. PENUTUP	367
6.1. Temuan Penelitian	367
6.2. Implikasi Penelitian	375
DAFTAR PUSTAKA	397

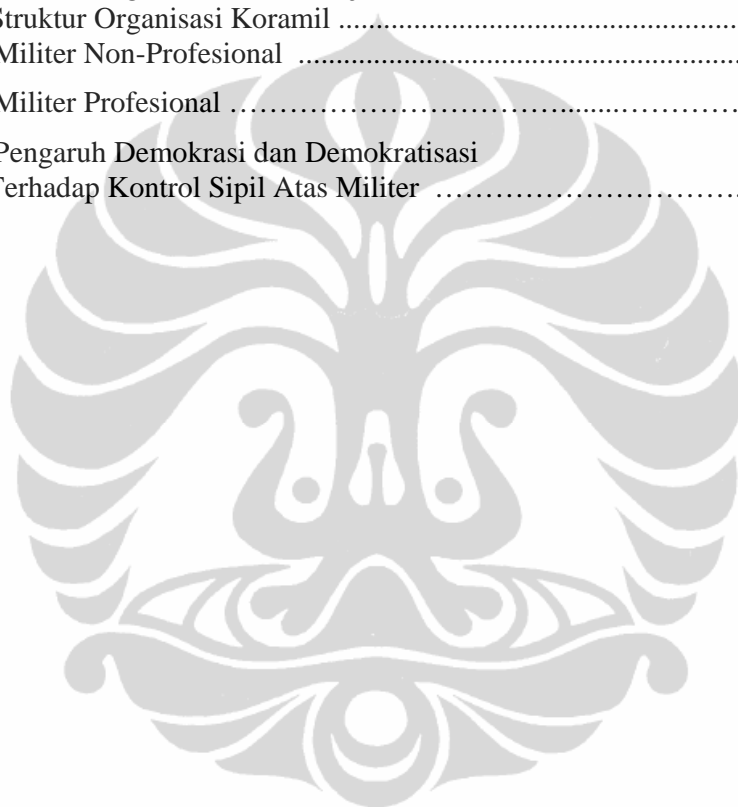


DAFTAR TABEL


Tabel 2.1. Komando Teritorial (Komandemen) KNIL	67
Tabel 2.2. Perwira Pribumi Ala Suite KNIL	70
Tabel 2.3. Perwira Pribumi Cadangan KNIL	73
Tabel 2.4. Perwira Pribumi Pensiunan KNIL	74
Tabel 2.5. Perwira Pribumi Aktif KNIL	75
Tabel 2.6. Komandemen Jawa dan Sumatera	86
Tabel 2.7. Wilayah Divisi TKR Jawa	87
Tabel 2.8. Wilayah Divisi TKR Sumatera	88
Tabel 2.9. Divisi Tentara Republik Indonesia (TRI).....	89
Tabel 2.10. Divisi Tentara Nasional Indonesia (TNI)	91
Tabel 2.11. Perbandingan Divisi TKR, TRI dan TNI	92
Tabel 2.12. Teritorium dan Tentara (TT)	94
Tabel 2.13. Jumlah Kodam Pasca Pembuburan T&T	96
Tabel 2.14. Jumlah Kodam Setelah Penyederhanaan Maret-Mei 1985	97
Tabel 2.15. Jumlah Satuan Kowil TNI AD Pasca Orde Baru	98
Tabel 2.16. Satuan Kowil TNI AD di DKI Jakartab	120
Tabel 2.17 Sub-Komandemen TKR Sumatera	128
Tabel 2.18 Eks-Perwira KNIL-PETA dalam Kementerian Pertahanan	134
Tabel 2.19 Eks-Perwira KNIL dan PETA dalam TRI	137
Tabel 2.20. Fungsi Binter TNI AD Periode Tahun 1948-1998	146
Tabel 3.1. Perwira Teritorial Gubernur DKI Jakarta	164
Tabel 3.2. Perwira Teritorial Gubernur Jawa Timur	165
Tabel 3.3. Perwira Teritorial Gubernur Jawa Tengah	166
Tabel 3.4. Perwira Teritorial Gubernur Sumatera Selatan	166
Tabel 3.5. Perwira Teritorial Gubernur Sulawesi Selatan	167
Tabel 3.6. Perwira Teritorial Gubernur Sulawesi Tengah	168
Tabel 3.7. Perwira Teritorial Gubernur Irian Jaya/Papua	168
Tabel 3.8. Kowilhan Sebelum Penyederhanaan	177
Tabel 3.9. Kowilhan Sesudah Penyederhanaan Tahun 1973	179
Tabel 5.1 Kerjasama Kemitraan Pemerintah Kota/Provinsi DKI Jakarta dengan Satuan Kowil TNI AD	273
Tabel 5.2. Perbandingan APBN dan AB Dephankam dan ABRI Pra-Renstra s.d. Renstar V Hankamneg	282
Tabel 5.3 Perbandingan PDB, APBN dan AB Dephankam, TNI dan Polri Rentsra Hankamneg I-V Pelita II Renstra I	283
Tabel 5.4 Anggaran Dephan dan TNI Tahun Anggaran 2004-2010	286
Tabel 5.5 Implementasi Ide Perang Total dalam Satuan Kowil TNI AD	296
Tabel 5.6 Pengaruh Ancaman Eksternal dan Ancaman Internal Terhadap Kontrol Sipil	318
Tabel 5.7 Pengaruh Ancaman Terhadap Pretorianisme	321
Tabel 5.8 Pengaruh Kontrol Sipil Terhadap Pretorianisme	323

DAFTAR BAGAN DAN SKEMA

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Kodam	105
Bagan 2.2. Struktur Organisasi Kodam Jaya/Jayakarta	106
Bagan 2.3. Struktur Organisasi Korem	109
Bagan 2.4. Struktur Organisasi Tim Intelijen Kodam	111
Bagan 2.5. Struktur Organisasi Kodim	114
Bagan 2.6. Struktur Organisasi Tim Intelijen Kodim	115
Bagan 2.7. Struktur Organisasi Koramil	116
Skema 5.1. Militer Non-Profesional	279
Skema 5.2. Militer Profesional	279
Skema 5.3. Pengaruh Demokrasi dan Demokratisasi Terhadap Kontrol Sipil Atas Militer	316



DAFTAR SINGKATAN




ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AMD	= ABRI Masuk Desa
AFNEI	= Allied Forces Netherlandas East Indiest
Ajendam	= Ajudan Jenderal Kodam
BIN	= Badan Intelijen Negara
Babinsa	= Bintara Pembina Desa
Babinminvetcaddam	= Badan Pembina Administrasi Veteran RI dan Cadangan TNI Kodam
Bakesbangpol	= Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bangukat	= Pembangunan Kekuatan
Bekangdam	= Perbekalan Dan Angkutan Daerah Militer
BB	= Binnenlands Bestuur
Binkamwil	= Pembinaan Keamanan Wilayah
Binkuat	= Pembinaan Kekuatan Militer
Bintaldam	= Pembinaan Mental Kodam
Bintahwil	= Pembinaan Ketahanan Wilayah
Binter	= Pembinaan Teritorial
BKO	= Bawah Kendali Operasi
BPKKP	= Badan Penolong Keluarga Korban Perang
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DKI	= Daerah Khusus Ibukota
Danrem	= Komandan Korem
Dandim	= Komandan Distrik Militer



Danramil	= Komandan Ranyon Militer
Danyon	= Komandan Batalyon
Danki	= Komandan Kompi
DEE	= Devide et Empera
Denmadam	= Detasemen Markas Kodam
Deninteldam	= Detasemen Intelijen Kodam
GAM	= Gerakan Aceh Merdeka
Golkar	= Golongan Karya
Gunkut	= Penggunaan Kekuatan Militer
Hubdam	= Perhubungan Kodam
Itdam	= Inspektorat Pengawasan Umum dan
Pembendaharaan	
Jasmildam	= Jasmani Militer Kodam
KMA	= Koninklijk Militaire Akademie
KNI	= Komite nasional Indonesia
KNIL	= Koninklijk Nederlansch Indische Leger
Kanmivetcad TNI	= Kantor Administrasi Veteran RI dan Cadangan
Kesdam	= Kesehatan Kodam
Kesbang	= Kesatuan Bangsa
Kudam	= Keuangan Kodam
Kodau	= Komando Daerah Laut
Kodaeral	= Komando daerah Udara
Kumdam	= Hukum Kodam
Koter	= Komando Teritorial
Kowil	= Komado Kewilayahan

Kowilhan	= Komando Wilayah Pertahanan
Kodam	= Komando Daerah Militer
Korem	= Komando Resort Militer
Kodim	= Komando Distrik Militer
Koramil	= Komando Rayon Militer
Kihub	= Kompi Perhubungan
Kima	= Kompi Markas
KSAD	= Kepala Staf Angkatan Darat
KTD	= Komando Teritorium Djawa
KTS	= Komando Teritorium Sumatera
Laksus	= Pelaksana Khusus
MBT	= Markas Besar Tentara
Menwa	= Resimen Mahasiswa
Muspida	= Musyawarah Pimpinan Daerah
Muspika	= Musyawarah Pimpinan Kecamatan
Muspides	= Musyawarah pimpinan desa
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
NICA	= Nederlands Indisch Civil Administration
OKP	= Organisasi Kepemudaan
OPM	= Organisasi Papua Merdeka
Opsintel	= Operasi Intelijen
Opspur	= Operasi Tempur
Opster	= Operasi Teritorial
PAH	= Panitia Ad Hoc
PDRI	= Pemerintahan Darurat Republik Indonesia



PDI	= Partai demokrasi Indonesia
PETA	= Pembela tanah Air
PID	= Politieke Inlichting Dienst
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
PPKI	= Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPP	= Partai Persatuan Pembangunan
POLRI	= Polisi Republik Indonesia
Pangdam	= Panglima Daerah Militer
Pangkopkamtib	= Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Paldam	= Peralatan Kodam
Pendam	= Penerangan Kodam
Pomdam	= Polisi Militer Kodam
PPM	= Pemuda panca Marga
Pulahtadam	= Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kodam
Ratih	= Rakyat Terlatih
Renstra	= Rencana Strategis
Rera	= Rekonstruksi dan Reorganisasi
RI	= Republik Indonesia
Rindam	= Resimen Induk Kodam
RIS	= Republik Indonesia Serikat
SARA	= Suku, Agama dan Ras
SLOC	= Sea Line of Communication
Sinteldam	= Staf Intelijen Kodam
Sopsdam	= Staf Operasi Kodam

Spersdam	= Staf Personel Kodam
Slogdam	= Staf Logistik Kodam
Sterdam	= Staf Teritorial Kodam
Srendam	= Staf Perencanaan Kodam
Setumdam	= Sekretariat Umum Kodam
Sandidam	= Persandian Kodam
Sishankamrata	= Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Siskamling	= Sistem Keamanan Lingkungan
TKR	= Tentara Keamanan Rakyat
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	= Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AU	= Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNI AL	= Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
T & T	= Tentara dan Teritorium
Topdam	= Topografi Daerah Militer
Toga	= Tokoh Agama
Tomas	= Tokoh Masyarakat
TRI	= Tentara Republik Indonesia
UU	= Undang-Undang
Zidam	= Zeni Kodam

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara Narasumber Unsur TNI AD
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara Narasumber Unsur Pemda
- Lampiran 3. Jawaban Wawancara Tertulis Mabes TNI AD
- Lampiran 4. Jawaban Wawancara Tertulis Kodam Jaya/Jayakarta
- Lampiran 5. Jawaban Wawancara Tertulis Walikota Jakarta Pusat
- Lampiran 6. Penjelasan Tugas dan Fungsi Eselon Pembantu dan Pelayanan Kodam
- Lampiran 7. Babinsa di Lingkungan Kodam Jaya/Jayakarta



PETA PROVINSI DKI JAKARTA

